

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Pustaka Buku

- Ali, H. Zainudin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. MKRI
- Gormley, B. 2015. *Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why they Do it*, In *The Oxford Handbook of Classics in Public Policy and Administration*. Oxford University Press.
- Keil, S., & Anderson, P. 2018. *Desentralisasi sebagai alat untuk penyelesaian konflik*. Penerbitan Edward Elgar.
- Mardiasmo, M. B. A., Et Al. 2021. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Riantoni, C. 2021. *Metode Penelitian Campuran: Konsep, Prosedur Dan Contoh Penerapan*. Penerbit Nem.
- Sugiyono, D. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ramlan & Eka, 2021. *Hukum Pemerintahan Desa*. Enam Media Press

Sumber Pustaka Artikel Jurnal

- Aji, S., Vitriya, R., Mufarokhah, N., & Khasanah, U. (2023). *The Role Of Village Apparatus In Accountability, Transparency And Responsibility Of Dana Desa Management In Maguan Village*. *International Journal Of Applied Finance And Business Studies*, 11(3), 491-500.
- Ajib Rakhmawanto, "Perspektif Politisasi Birokrasi Dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Birokrasi Pemerintah," *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 3, No. 1 (June 29, 2019): 19–32
- Akbar Pandu Dwinugraha, "Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)," *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2, No. 1 (April 1, 2017).
- Ali, Muhammad, Et Al. *Pendekatan Max Weber: Birokrasi Serta Struktur Kekuasaan Dalam Organisasi Pendidikan Modern*. *Jurnal Cahaya Mandalika*.
- Allison Christians And Laurens Van Apeldoorn, "The Oecd Inclusive Framework," *Ssrn Electronic Journal*, 2018.

- Amalia Wizrotul Avina, "Model Transparansi Anggaran Desa Di Yogyakarta," *Paradigma Polistaat: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 6, No. 2 (December 29, 2023): 35–42.
- Dara, C., & Kerti, R. B. (2023). Urgensi Penerapan Larangan Rangkap Jabatan Di Lingkungan Pemerintahan Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Penggunaan Dana Desa. *Lontar Merah*, 6(2), 713-727.
- Dauhi, Kartin, Rustam Tohope, Fenti Prihatini Tui, Dan Alexander H. Badjuka. 2025. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Kajian Kualitatif Transparansi, Tanggung Jawab, Pengendalian, Dan Responsivitas Di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo". *Ilmu Pengetahuan Dan Masyarakat Abdurrauf* 2 (1):28-36.
- Farikhah, D. S. N., Laila, N., & Khamim, K. (2024). Rangkap Jabatan Kepala Daerah Perspektif Hukum Positif dan Hadis tentang Larangan Berambisi pada Jabatan. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 119-134.
- Gunadi, Hanifah Firda Fauzia; Sjaf, S.; Kolopaking, L. M. Pengaruh Aktor Lokal Dominan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Sodality: Jurnal Soisologi Pedesaan*, 2020, 8.03: 152-166.
- Handraini, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 601-608.
- Ilham Mubarak, Dimas. 2024. "Romantisme Antara Norma Dan Tradisi: Pembuatan Minuman Keras Tradisional Studi Kasus Di Desa Wlahar Kecamatan Wangon". *Seri Prosiding Ilmu Sosial & Humaniora* 17 (Juli): 190-197.
- Janah, B. R., Purnama, S., & Syamsuri, S. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance: Partisipasi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Journal Of Public Administration And Local Governance*, 5(2), 132-143.
- Julia Ivanna, "Village Governance In Realizing Excellent Service In Jumantuang Village, Siempat Nempu District, Dairi Regency," *Journal Of Public Administration Studies* 7, No. 1 (April 1, 2022): 21–25.
- Kadir, A. (2015). Prinsip-Prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jakpp (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 40-54.

- Kohongia, Z., & Achir, N. (2019). Praktek Rangkap Jabatan Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara. *Jurnal Legalitas*, 12(2), 128-145.
- Kurniawan, R. A. (2025). Analisis Hukum Tentang Anggota Badan Permusyawaratan Desa Yang Merangkap Jabatan Sebagai Perangkat Desa. *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 3(1).
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210-229.
- Purnomo, A., Setiyono, B., & Yuwanto, Y. (2023). Efektivitas Kerja: Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa. *Jurnal Education And Development*, 11(1), 101-106.
- Putu Prema Sulistyaning Putri, Rhosalina Damayanti, And Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari, "Village Fund Allocation Practice: The Investigation Of Accountability And Transparency," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 6, No. 2 (January 12, 2022): 455.
- Rahayu, R., Anwar, F., & Darmi, T. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (Jmpkp)*, 5(1).
- Ramadhan, D. A., & Fadli, U. M. D. (2023). Perilaku Kerja Karyawan Pt Pos Indonesia Cabang Karawang. *Primer: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 331-341.
- Rozuli, Ahmad Imron, Et Al. Birokrasi, Korupsi, Dan Kekuasaan. *Jurnal Transformative*, 2017, 3.1: 1-14.
- Saidah, L., & Utami, S. (2024). Tindak Tutur Ilokusi Pada Cerpen Arti Persahabatan Karya Tafassahu. *Hortatori: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 8(1), 118-123.
- Saputra, Ahmad, Muhammad Fallah, Victorina Indranarwasti, And Yohanes Kosasih. 2024. "Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10 (14), 61-76.
- Setyowati, E. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (Idm): Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang. *Jispo Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 170-188.
- Shams Firdaus, Pemisahan Kekuasaan Di Negara Kontemporer, 7 (2) *Ijlmh Halaman* 2089 - 2112 (2024).

- Smith Em. Wawancara Telepon Dalam Penelitian Kesehatan: Ringkasan Bukti. *Perawat Res.* 2005; 12(3):32-41.
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa indonesia terhadap kepercayaan masyarakat desa: kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1).
- Suparto, S. (2016). Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam. *Jurnal Selat*, 4(1), 115-129.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peraturan Desa Sebagai Ahli Lex Politik Hukum Nasional Indonesia. (2023). *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 4(1).
- Usman, J., Rusydi, M., & Naidah, N. (2023). Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Melalui Diklat Bidang Pelayanan Publik Di Sulawesi Selatan. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 4947-4960.
- Wati, I. (2023). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Pamijahan Kabupaten Tasikmalaya. *Jiana (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Учредители: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 21(3), 231-243. Ira Sandika Et Al., "Analisis Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No. 1 (February 29, 2024): 212–23
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas organisasi sektor publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17-26.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang (Uu) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat

Sumber Pustaka Halaman Web

“Desaku Lamuk,” Web Desa Lamuk, Accessed December 11, 2025.

“Lamuk, Kaliwiro, Wonosobo,” Wikipedia, Accessed December 11, 2025.

Bungo, “Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lkd) Sesuai Dengan Permendagri Nomor
18 Tahun 2018,” October 22, 2023.

Mariyadi, “Tugas Rt Dan Rw Itu Berat, Tapi Gajinya Tidak Seberapa,” Up Desa.Com,
2024.

Angel, “Pengertian Yuridis Empiris Adalah Pendekatan Metodologi Penting Dalam
Penelitian Hukum Modern,” Pdi-P.Com, March 14, 2023.

Mariyadi, “Larangan Perangkat Desa Sesuai Uu Desa ,” Updesa, May 26, 2024.

Rahmat Junaidi, “Pengaturan Executive Review Terhadap Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota,” Jdih.Kalteng, August 3, 2018.

Websites

Diyanti, E. N. 2023. *Dinamika Politik Dalam Proses Pengambilan Keputusan
Pembentukan Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Tengah Tahun 2022*
(Doctoral Dissertation, Universitas Nasional).

Futra, H., & Wicaksono, I. 2015. *Implementasi Good Governance Dalam Bidang
Administrasi Desa*.

Ghozali, M. Z. Z. 2024. *Analisis Rangkap Jabatan Perangkat Desa Perspektif
Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Masalah Mursalah (Studi Desa
Kenalan Kabupaten Magelang)* (Doctoral Dissertation, Iain Salatiga).

Kartina, 2024 “Rangkap Jabatan Kepala Desa Dan Camat Berdasarkan Pasal 29
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Perspektif Fiqh
Siyasah”.

Sari, N. 2020. *Tinjauan Terhadap Kewenangan Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Studi Pada Wilayah Kecamatan Tanjung Raja)* (Doctoral
Dissertation, Universitas Muhammadiyah Kotabumi).

Berita

Devira Prastiwi, “Memahami Trias Politica, Teori Politik Montesquieu Yang Terkenal” (Jakarta, June 13, 2022).

Mohar Syarif, “Ombudsman Ri Ungkap Adanya Potensi Maladministrasi Di Perangkat Desa” (Jakarta, September 12, 2023).

Youtube

“Good Governance Dalam Pemerintahan Desa” Eps 193” (Tv Desa, 2021).

Eps.15: Jimly Asshiddiqie - Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam Uud 1945 (JSLG RESMI, 2022).

